

SEKURITISASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS

UIGHUR DI XINJIANG 2018 - 2021



Oleh:

Mukhamad Ilham Rizki

15323114



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

SEKURITISASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS

UGHUR DI XINJIANG 2018-2021

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Mukhamad Ilham Rizki

15323114

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN
SEKURITISASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR
DI XINJIANG 2018-2021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

6 JULI 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.I.P., B,Int,St.,M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P.,M.A.
- 2 Hangga Fathana, S.I.P., B,Int,St.,M.A.
- 3 Enggar Furi Hardianto, S.I.P.,M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan skripsi ini saya Mukhamad Ilham Rizki mendeklarasikan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas dan sejujur-jujurnya.

Tidak ada pokok materi yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami seluruh peraturan serta prosedur universitas terkait tindakan plagiarisme.

Memberikan pernyataan palsu dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

6 Juni 2022



Mukhamad Ilham Rizki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	5
1.3. TUJUAN PENELITIAN	5
1.4. CAKUPAN PENELITIAN	5
1.5. TINJAUAN PUSTAKA	7
1.6. KERANGKA PEMIKIRAN	12
1.7. ARGUMEN SEMENTARA	15
1.8. METODE PENELITIAN	16
BAB II SIKAP PEMERINTAH TIONGKOK DITINJAU MELALUI KERANGKA AKTOR SEKURITISASI, <i>SPEECH ACT</i>, DAN <i>REFERENTIAL OBJECT</i>	18
2.1 <i>SPEECH ACT</i> DAN <i>REFERENTIAL OBJECT</i>	19
BAB III <i>EXISTENTIAL THREAT</i>, <i>EMERGENCY ACTION</i>, <i>BREAKING FREE OF RULES</i>: SEKURITISASI TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG	30
3.1. <i>EXISTENTIAL THREAT</i> : ANCAMAN YANG ADA DAN MENGANCAM EKSISTENSI KEDAULATAN DAN KE- AMANAN TIONGKOK	31
3.2. <i>EMERGENCY ACTION</i> : <i>COUNTER OF TERRORISM</i> ETNIS UIGHUR DI <i>CAMP RE-EDUCATION</i> DAN SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION SEBAGAI USAHA MELAWAN <i>THREE EVILS</i>	34
3.3. <i>BREAKING FREE OF RULES</i> : PELANGGARAN ATURAN TERHADAP TINDAKAN SEKURITISASI ETNIS UIGHUR.....	39
BAB IV PENUTUP	45

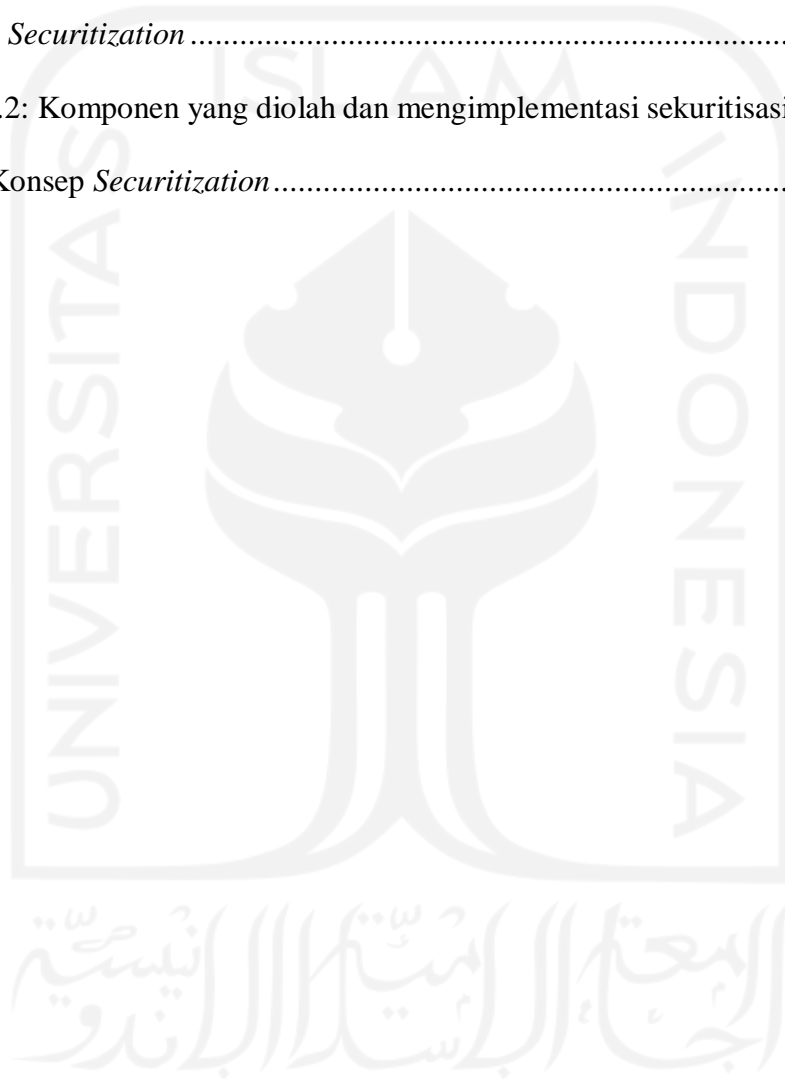
4.1. KESIMPULAN	45
4.2. REKOMENDASI.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel dan Grafik

Tabel 1.1: Komponen yang mengimplementasi sekuritisasi etnis Uighur dalam Konsep <i>Securitization</i>	14
Tabel 1.2: Komponen yang diolah dan mengimplementasi sekuritisasi etnis Uighur dalam Konsep <i>Securitization</i>	43



ABSTRACT

Problems between the Chinese government and the Uighurs continue to this day. In order to protect the region of Xinjiang province in order to remain safe and peaceful, the Chinese government created a Re-education Camp or a job training and education center. Re-education Camp started operating in 2018, this camp aims to fight the contradictions that exist in the Xinjiang region, the formation of this camp raises international pros and cons. The concept of securitization is the concept used in this scientific work. The emergence of nations that became the struggle of the Uighur ethnic group was influenced by terrorist groups to break away from China. the Chinese government's hatred of acts of terrorism, extremism, and ethnic Uighur separatists. Threats and sanctions imposed on China by western countries, the United States, and the European Union government apply special rules. The special rules restrict the movement of Uighurs. The deployment of the armed forces in the Xinjiang region. high-tech surveillance cameras to keep an eye on every activity of the Uighurs. The establishment of a re-education camp for the Uighurs of Xinjiang with the aim of eliminating the Three Evils doctrine by the Chinese government. Anti-terror & Peace Mission as an effort to fight the Three Evils with regular training with all SCO members and the support of all member countries against Three Evils.

Keywords: Securitization, Chinese government, and ethnic Uyghur

ABSTRAK

Permasalahan antara pemerintah Tiongkok dan Uighur terus berlanjut hingga hari ini. Demi melindungi wilayah provinsi Xinjiang agar tetap aman dan damai, pemerintah Tiongkok membuat Re-education Camp atau pusat pelatihan dan pendidikan kerja. Re-education Camp mulai beroperasi pada tahun 2018, camp ini bertujuan untuk melawan kontradiksi yang ada di wilayah Xinjiang, pembentukan camp ini menimbulkan pro dan kontra internasional. Konsep sekuritisasi merupakan konsep yang digunakan dalam karya ilmiah ini. Munculnya negara-negara yang menjadi perebutan etnis Uighur dipengaruhi oleh kelompok teroris untuk melepaskan diri dari Tiongkok. kebencian pemerintah Tiongkok terhadap aksi terorisme, ekstremisme, dan separatis etnis Uighur. Ancaman dan sanksi yang dijatuhkan kepada Tiongkok oleh negara-negara barat, Amerika Serikat, dan pemerintah Uni Eropa. Aturan khusus membatasi pergerakan orang Uighur. Pengerahan angkatan bersenjata di wilayah Xinjiang. kamera pengintai berteknologi tinggi untuk mengawasi setiap aktivitas warga Uighur. Pendirian kamp re-edukasi bagi warga Uighur Xinjiang dengan tujuan menghilangkan doktrin Tiga Kejahatan oleh pemerintah Tiongkok. Misi Anti Teror & Damai sebagai upaya memerangi Three Evils dengan pelatihan rutin bersama seluruh anggota SCO dan dukungan seluruh negara anggota melawan Three Evils.

Kata Kunci: Sekuritisasi, Pemerintah China, dan Etnis Uighur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiongkok yang berada di wilayah Asia Timur sebagai salah satu negara industri maju bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Dengan wilayah Tiongkok yang luas membuat sebagian dari wilayahnya ada yang berbatasan dengan negara Eropa, akibat dari kondisi geografis tersebut membuat penduduk Tiongkok sendiri menjadi lebih beragam karena terjadinya perkawinan silang (Ryselda Claudya, 2020).

Dengan adanya percampuran ini membuat etnis yang ada di Tiongkok beragam, salah satunya yaitu etnis Uighur. Uighur ini merupakan keturunan dari suku terdahulu yaitu kerajaan Kekhanan Uighur yang banyak tersebar di Asia tengah dan beragama Islam. Jumlah populasi dari suku Uighur juga tersebar hingga Kazakhstan, Kyrgystan, dan Uzbekistan. Etnis Uighur menganggap diri mereka lebih dekat dengan negara dari Asia tengah secara budaya dan etnis. Uighur berkomunikasi menggunakan bahasa Uighur itu sendiri yang merupakan turunan dari bahasa Turki.

Permasalahan antara pemerintah Tiongkok dan Uighur terus terjadi sampai sekarang. Demi melindungi wilayah provinsi Xinjiang agar tetap aman dan damai, pemerintah Tiongkok membuat *Re-education Camp* atau Pusat pendidikan dan pelatihan kerja. *Re-education Camp* mulai beroperasi pada tahun 2018, kamp ini bertujuan untuk melawan gerakan terorisme yang ada di wilayah Xinjiang, pembentukan kamp ini memunculkan pro dan kontra internasional.

Karena adanya *Re-education Camp*, beberapa negara mendesak guna menghentikan kegiatan *Re-education Camp*, 22 delegasi negara dari PBB dan uni eropa, termasuk Australia, Selandia Baru, Jepang dan Kanada menandatangani petisi yang memprotes *Re-education Camp* di Xinjiang (Lam, 2017).

Pada 2018, PBB menyatakan kekhawatir atas penahanan massal Uighur di Xinjiang dan mendesak agar mereka dibebaskan. Tiongkok menyatakan bahwa mereka ditahan sebagai alasan untuk mengatasi terorisme (*BBC News Indonesia*, 2020). Pernyataan ini dikeluarkan setelah komisi PBB mendengar beberapa

laporan bahwa sampai satu juta Uighur di Xinjiang ditahan di *Re-education Camp*.

Pemerintah Tiongkok menepis tuduhan tersebut, tetapi mengakui beberapa ekstremis ditahan untuk di didik kembali. Pemerintah Tiongkok memandang teroris dan separatis Islamis harus bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di Xinjiang (Kaltman, 2007).

Saat dilakukan investigasi dan pemeriksaan oleh anggota PBB komite penghapusan diskriminasi ras menemukan adanya laporan yang dipercaya memiliki indikasikan bahwa pemerintah Tiongkok telah membuat Xinjiang menjadi kamp pengasingan besar-besaran. Jawaban pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa Uighur tetap mendapatkan hak sepenuhnya namun disisi lain pemerintah Tiongkok mengakui bahwa adanya kamp tersebut bertujuan sebagai tindakan atas respon terorisme. Wilayah Xinjiang mengalami bermacam-macam peristiwa kekerasan dengan pembersihan gerakan terorisme selama bertahun-tahun (Senduk, 2014).

Xinjiang memang sering terjadi perselisihan antar etnis dan agama. Upaya integratif yang dipraktekan pemerintah Tiongkok dengan pendidikan politik terbukti tidak berhasil mengintegrasikan Uighur dengan etnis Tiongkok lain (Walt,

1991). Hingga eskalasi pemberontakan etnis Uighur pecah dengan adanya migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Han ke Xianjiang dan Urumqi.

Banyak pihak menyebutkan bahwa migrasi besar-besaran etnis Han bertujuan untuk menyingkirkan etnis Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi. Kedua wilayah ini diketahui merupakan salah satu wilayah Tiongkok yang tercatat memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar dan posisi yang strategis karena langsung berbatasan dengan Asia Tengah (Bhattacharji 2008).

Xinjiang sering disebut sebagai “*National Energy Strategy Base*” karena berlimpahnya sumber daya alam yang ada di wilayah itu. Faktanya, energi yang bersumber dari Xinjiang juga memiliki “*market*” dan peminat yang banyak. Tiongkok juga mengembangkan teknologi berbasis di Xinjiang untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi Xinjiang. Semua infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok bertujuan untuk memastikan bahwa industri energi dapat dikuasai (Hong & Yang, 2020).

Xinjiang telah menjadi salah satu wilayah terpenting bagi ketersediaan energi Tiongkok (Duan et al, 2016). Sebagai sebuah provinsi yang memiliki wilayah lebih dari 1.6 juta km², Xinjiang memiliki persediaan energi serta berbagai mineral serta hasil tambang berlimpah. Xinjiang memiliki 56 tambang emas yang juga menjadikan Xinjiang sebagai penghasil emas terbesar kedua di dunia (Wong, 2014). Selain itu, Xinjiang juga diperkirakan mampu memberikan pasokan batu garam kepada dunia selama 1000 tahun dengan produksi tahunan mencapai 450.000 ton per tahun (Duan et al, 2016).

Etnis Han diberikan jabatan tinggi dan kekuasaan penuh, Sementara Uighur dijadikan penduduk kelas bawah yang dipekerjakan sebagai buruh dan pekerja

kasar untuk memenuhi kebutuhannya. Sesungguhnya yang melakukan kejahatan terhadap Uighur tidak hanya pemerintah dan aparatnya yang bertindak represif, namun juga orang-orang Tiongkok keturunan Han yang banyak melakukan berbagai permusuhan dan pelecehan terhadap Uighur. Dimana Uighur diperlakukan seperti suku Indian di Amerika (Saragih, 2016).

Pemerintahan Tiongkok pada era Mao membebaskan adanya hak beragama berubah menjadi pemerintahan Tiongkok yang mengekang kebebasan beragama. Pada pemerintahan saat ini, melihat dengan banyaknya bukti aksi teror di Xinjiang, pemerintah Tiongkok sekarang melakukan tindakan represif terhadap etnis Uighur (Anthony, Emmers, and Acharya, 2006).

Penyerangan dilakukan karena etnis Uighur merasa ditindas dengan tindakan pemerintah yang melakukan tindakan represif dan diskriminatif terhadap mereka terutama dalam urusan keagamaan. Walaupun pemerintah pusat telah membuat sebuah kebijakan di mana di dalamnya terdapat adanya kebebasan hak beragama bagi setiap masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya (Fransisca. M, 2020).

Dalam posisi ini Tiongkok merasa terancam dengan adanya gerakan-gerakan ekstrimis, teroris, dan separatis yang mengancam keamanan negara, adapun gerakan yang mengancam keamanan negara karena banyaknya kriminalisme berupa peledakan, pembakaran, pembunuhan, demonstrasi yang rusuh, dan penculikan yang didalangi etnis Uighur terhadap Pemerintah Provinsi Xinjiang (*BBC News* 2018)

Adanya kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Saat itu, pemerintah Xinjiang menganggap tindakan perlawanan terhadap pemerintah provinsi Xinjiang yang dilakukan etnis Uighur sebagai sebuah ancaman untuk melengserkan pemerintah baru Xinjiang. Namun aksi penyerangan tersebut dapat diatasi oleh militer Tiongkok (Upayoni et all. 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur 2018–2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan studi kasus dan sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok Kepada etnis Uighur 2018-2021
2. Menganalisa upaya sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur Menggunakan teori sekuritisasi /melalui sudut pandang sekuritisasi oleh Buzan dkk.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari tahun 2018 sampai 2021 karena tahun 2018 hingga 2021 pemerintah Tiongkok sangat tidak terima dengan ancaman serta sanksi yang dijatuhkan oleh internasional yaitu AS, Uni Eropa dan negara lainya yang merupakan mitra dagang mereka terkait isu genosida terhadap etnis Uighur, yang menghambat proses kerjasama antara Tiongkok dan negara-negara mitra dalam perdagangan (BBC, 2021) .

Penelitian ini akan berakhir di tahun 2021 karena adanya peralihan kepemimpinan Amerika Serikat dari Donald Trump ke Joe Biden sebagai presiden

baru yang mempengaruhi kebijakan bahwa Amerika dan sekutunya tetap mengancam Tindakan Tiongkok terhadap etnis Uighur namun masalah ini tidak menjadi prioritas utama, dan hubungan ekonomi dan dagang antara Tiongkok- AS lebih di prioritaskan diutamakan kembali, serta di 2022 Tiongkok menerima kunjungan duta komisioner PBB untuk HAM ke Xinjiang (VOA, 2022).

Tiongkok belajar dari kejadian 11 September di WTC dengan memperketat keamanan negara dan wilayahnya dari ancaman teroris dan orang asing terutama etnis yang menganut agama Islam yang dicap sebagai teroris dalam dunia internasional serta sebagai ancaman di berbagai negara-negara di barat.

Sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dengan tujuan keamanan dan menjalankan program *Re-education Camp* kepada minoritas etnis Uighur dengan penerapan yang ketat dengan bantuan militer dan pengawasan 24 jam nonstop menjadi bukti bahwa pemerintah Tiongkok benar-benar tidak memberikan ruang sedikitpun kepada orang-orang yang dianggap dan di diagnosis sebagai teroris atau kelompok yang mengancam keamanan Tiongkok sendiri (Clarke, 2008).

peneliti mencoba meneliti dan melihat kasus ini dari sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok dengan tujuan untuk menjaga keamanan negaranya dari ancaman etnis Uighur yang di cap sebagai teroris, ekstrimis, dan separatis dan memberi tahu negara lain bahwa masalah terorisme adalah masalah yang serius bagi semua negara (*Congressional-Executive Commission On China Annual Report*. 2014).

1.5 Tinjauan Pustaka

Peneliti meneliti dari berbagai sumber literatur seperti buku, skripsi, dan karya ilmiah, dengan tujuan memperjelas dan memperkuat bahwa konflik tersebut layak untuk diteliti, berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap Uighur di Xinjiang diantaranya adalah:

Ryseldha Claudya Purba, dalam penelitiannya di tahun 2020 yang berjudul “Upaya Tiongkok Dalam Mempertahankan Provinsi Xinjiang Ditengah Tekanan Internasional”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana upaya-upaya pemerintah Tiongkok mempertahankan Xinjiang dari tekanan yang membuat provinsi tersebut ingin memisahkan diri dari Tiongkok.

Adapun dalam penelitian ini dijelaskan permasalahan yang membuat hubungan antara pemerintahan dan warga Xinjiang yaitu etnis Uighur kian memburuk, dalam penelitian Ryseldha ini memiliki kekurangan dimana pembahasan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ini memiliki kesan hanya untuk mendinginkan tekanan internasional saja tanpa ada penanganan dalam internal Tiongkok sendiri sehingga tercipta upaya-upaya yang belaka saja.

Merujuk pada penelitian ilmiah James Senduk tahun 2014 dengan judul “Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur di Tiongkok” memaparkan hasil penelitian bahwa terdapat pelanggaran hak-hak yang seharusnya diberikan oleh negara peserta konvensi deklarasi universal hak asasi manusia dimana hak untuk diperlakukan sama dalam sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sebagai tindakan demi memperjuangkan haknya, etnis Uighur menempuh dua jalan yaitu secara damai melalui World Uighur Congress memberikan tekanan kepada pemerintah Tiongkok melalui aksi-aksi demonstrasi yang berujung teror oleh organisasi serta kelompok Uighur yang ingin merdeka dari Tiongkok.

Dalam penelitian James Senduk ini memiliki kekurangan dimana pembahasannya terlalu bias kearah etnis Uighur sebagai korban dan subjek diskriminasi tanpa menjelaskan awal mengapa terjadinya permasalahan antara kedua belah pihak dan apa yang dilakukan oleh etnis Uighur sehingga di cap sebagai ekstrimis, separatis, dan teroris oleh pemerintah Tiongkok.

Dalam penelitian Jonathan Gery Boy pada tahun 2014 dengan tema "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif Terhadap Etnis Minoritas (Studi Kasus: Etnis Muslim Uighur Di China)", peneliti membuat kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar semua manusia yang dimiliki sejak manusia lahir atau saat dimulainya manusia tersebut berinteraksi dengan orang lain.

Hak asasi manusia tidak dapat diambil oleh siapapun sekalipun negara, negara mestinya memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap warganya, tidak peduli apakah warganya tersebut termasuk dalam etnis mayoritas ataupun minoritas, terkhusus etnis minoritas yang sudah diatur akan hak-haknya berdasarkan hukum internasional dalam instrumen-instrumen internasional, dalam konflik ini antara pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur dilatar belakangi oleh tujuan Tiongkok untuk menciptakan sekuritisasi sehingga pemerintah Tiongkok melakukan tindakan represif yang mendiskriminasikan Uighur, dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Dalam penelitian Jonathan Gery Boy sebenarnya sudah sangat spesifik dengan menjadikan *One China Policy* sebagai tindakan yang mendiskriminasi etnis Uighur namun tidak ada kejelasan mengapa pemerintah Tiongkok membuat *One China Policy* serta sebab musabab diskriminasi ini terjadi, namun *One China Policy* dalam kasus sekuritisasi ini tidak ada keterkaitan karena wilayah Xinjiang (XUAR) sangat berbeda dari Hongkong dan Macau sehingga pemerintah Tiongkok menerapkan *One China Policy* pada kedua negara itu.

Dalam karya Preeti Bhattacharji tahun 2008 yang berjudul "*Uighurs and China's Xinjiang Region*" menjelaskan bahwa Uighur menyebut kehadiran Tiongkok di Xinjiang sebagai bentuk tindakan imperialisme, dan Uighur meningkatkan seruan untuk merdeka seringkali dengan jalan kekerasan dimulai tahun 1990an melalui kelompok separatis seperti Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM).

Tiongkok telah bereaksi dengan melakukan program migrasi dari mayoritas etnis Tiongkok Han ke Xinjiang. Tiongkok juga telah menjalin hubungan ekonomi dengan Xinjiang dan mencoba untuk memotong sumber-sumber potensial dukungan separatis dari negara-negara tetangga yang secara bahasa dan keturunan terkait dengan Uighur.

Dalam penelitian Preeti Bhattacharji ini memiliki kekurangan dimana pembahasannya hanya berfokus pada sejarah serta permasalahan awal saja dari pertikaian antara pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur terkesan seperti hanya informasi umum saja tidak eksplisit merujuk kepada penyelesaian masalah.

Merujuk pada karya ilmiah tahun 2008 yang di tulis oleh Clarke berjudul "*China's War on Terror in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent*

Uighur Separatism, Terrorism, & Political Violence”. Clarke menjelaskan tentang konsekuensi dari label "*Terrorist*" yang dilabelkan pada Uighur di Xinjiang oleh pemerintah Tiongkok. Clarke menjelaskan bahwa sepanjang sejarah pemberontakan di Xinjiang telah menjadi respons terhadap perubahan kebijakan mengenai orang Uighur, baik selama masa Maois atau Xi Jinping saat ini.

Menurut Clarke tindakan Uighur tersebut bukanlah tindakan terorisme, bertentangan dengan yg dikatakan oleh Tiongkok dan negara-negara yang mendukung. Label "*Terrorist*" telah memberi kesadaran perjuangan mereka di dalam dunia internasional.

Karya ilmiah ini menjabarkan sesungguhnya kebijakan politik dan ekonomi Tiongkok membuat Uighur sangat kesulitan, bukan tidak mungkin bagi Uighur untuk mempertahankan identitas budaya mereka di Tiongkok, namun artikel yg ditulis oleh Clarke memiliki kekurangan dimana pembahasannya terlalu fokus pada pelanggaran yang dilakukan Tiongkok tanpa menjustifikasi kejahatan yang dilakukan etnis Uighur.

Berdasarkan pemaparan kajian pustaka di atas, terdapat beberapa hal kesamaan dalam penelitian dan dapat kita simpulkan. Pertama, penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal sudut pandang permasalahan yaitu sama-sama menjelaskan posisi Tiongkok sebagai aktor yang mencoba melindungi kedaulatan negaranya, walaupun ada perbedaan diantara yaitu Ryseldha Claudia mencoba mengambil cakupan internasional sedangkan peneliti fokus pada sekuritisasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok.

Kedua, penelitian Clarke memiliki persamaan subjek dan pokok bahasan dengan penelitian James Senduk tentang tindak rasisme terhadap etnis Uighur,

namun pada penelitian James Senduk lebih membahas perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur secara diskriminatif berdasarkan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965, sedangkan disini peneliti ingin meneliti cara Pemerintah Tiongkok mengamankan negaranya dengan melakukan sekuritisasi terhadap Uighur walaupun bersifat melanggar norma-norma yang telah ada di dunia internasional.

Ketiga, penelitian ini memiliki pembahasan studi kasus etnis Uighur di Xinjiang dengan penelitian Jonathan Gery Boy tentang tindakan diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur yang melanggar HAM, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Jonathan Gery boy yang menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran HAM demi ketertiban dan keberlangsungan negara.

Namun tetap mengabaikan hak-hak etnis Uighur akan tetapi pokok pembahasan dalam penelitian ini akan berfokus dengan langkah yang dilakukan pemerintah Tiongkok untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya dengan sekuritisasi walaupun melanggar norma dan HAM sekalipun.

Keempat, penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Pretti Battacharji dimana mayoritas etnis Uighur melakukan upaya kemerdekaan wilayah Xinjiang yang dipelopori oleh tentara Turkestan dengan menyerang pihak kepolisian dan warga lokal karna didasari oleh imperialisme yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Hal ini juga yang menyebabkan pemerintah Tiongkok melakukan tindakan represif dengan mensekuritisasi etnis Uighur.

Kelima, penelitian ini memiliki kesamaan subjek dan objek yaitu pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur namun ada perbedaan dimana di dalam penelitian Clarke menjelaskan bahwa teroris dan separatis yang di cap oleh pemerintah Tiongkok tidak mempunyai dasar atau kualifikasi yang dapat dikatakan tindakan terorisme, sedangkan dalam penelitian ini berfokus dalam upaya pemerintah Tiongkok dalam mensekuritisasi etnis Uighur atas dakwaan yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara.

1.6 Kerangka Pemikiran

Konsep Securitization oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde

Sebagai media pembuka untuk menjawab rumusan masalah diatas, peneliti menggunakan teori sekuritisasi yang dipelopori oleh Buzan dkk untuk dijadikan sebagai kerangka teori. Selama pertengahan tahun 1990an konsep sekuritisasi ini pertama kali digagas oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde dalam bukunya di tahun 1998 yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*.

Buzan dkk melihat konsep sekuritisasi sebagai salah satu bentuk proses isu yang telah terkonstruksi, sehingga menjadikan isu tersebut sebagai suatu isu keamanan yang sangat penting serta patut diberikan perhatian terhadapnya (Hough et al, 2015).

Dalam proses sekuritisasi para aktor menggunakan *Speech Act* untuk menggiring opini publik dan juga ada *Referential Object*. *Speech Act* adalah bentuk untuk mengonstruksi isu menjadi ancaman keamanan, menakutkan, dan memperingatan kepada negara lain bahaya dari ancaman tersebut.

Sedangkan *Referential Object* adalah objek referensi hal-hal yang terlihat terancam secara eksistensial dan yang memiliki klaim sah untuk bertahan hidup

atau aktor yang merasa terancam dan sadar harus meminta keamanan (Buzan, Wæver, and Wilde 1998, hal. 30).

Konsep sekuritisasi Buzan dkk cocok untuk diterapkan dalam permasalahan etnis Uighur sebagai justifikasi pemerintah Tiongkok atas ancaman, tuduhan dan sanksi yang diberikan oleh PBB dan negara-negara lain atas pelanggaran HAM. Berdasarkan klaim pemerintah Tiongkok melalui Xi-jinping mereka menyangkal dan menyebut kamp-kamp itu justru memberikan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme. Dalam pernyataan di dewan hak asasi manusia (HAM) PBB, Xi mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan kontra-terorisme sesuai dengan hukum.

Xi-Jinping mengatakan *“Xinjiang juga menikmati stabilitas sosial dan perkembangan yang baik setelah empat tahun tanpa kasus terorisme, fakta dasar ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa, atau penindasan agama di Xinjiang. Tuduhan yang menghasut seperti itu dibuat karena ketidaktahuan dan prasangka, itu hanya publisitas berlebihan yang jahat dan didorong secara politik, dan jauh dari kebenaran”* (CNN, 2021).

Dengan menyatakan bahwa objek referensi tertentu terancam keberadaan di dalamnya, maka aktor sekuritisasi mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan di luar batas norma untuk memastikan kelangsungan hidup objek referensi. Tindakan inilah yang dianggap sebagai tindakan keamanan yaitu atas dasar ketakutan *“di mana akan ada pihak lain yang membunuh kita”* sebagai subjek dorongan dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian, Buzan dkk menyimpulkan adanya tiga komponen dalam sekuritisasi yaitu *Existential Threat* (ancaman eksistensial), *Emergency Action* (tindakan darurat) dan *Effect on Inter*

Unit by Breaking Free of Rules (efek pada hubungan antar-unit dengan melanggar aturan) (Buzan dkk, 1998, hal. 27).

Isu publik yang mengalami sekuritisasi sebagai suatu ancaman nyata membutuhkan tindakan darurat dan membenarkan tindakan di luar Prosedur politik politik yang normal (Buzan dkk, 1998, hal. 29), tabel di bawah ini menjelaskan bagaimana tiga komponen dalam sekuritisasi diterapkan dalam kasus sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.

Tabel 1.1 Komponen dalam implementasi sekuritisasi etnis Uighur dalam Konsep *Securitisation*

Langkah Sekuritisasi	Definisi Buzan dkk	Aplikasi Teori
<i>Existential Threat</i> /Ancaman Eksistensial	Ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi sehingga dapat dikatakan isu sekuritisasi.	Sebuah ancaman yang diwacanakan oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur sehingga menjadi isu
<i>Emergency Action</i> / Langkah Darurat	Tindakan yang diambil aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan aktor secara darurat, terpaksa dan sifatnya bisa di cabut dan unilateral.	Tindakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk mengatasi ancaman eksistensial secara darurat, terpaksa dan bersifat unilateral dan dapat dicabut
<i>Effect on Inter Unit by Breaking Free of Rules</i> / pelanggaran aturan	Kondisi dimana aktor sekuritisasi memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.	Kondisi dimana pemerintah Tiongkok memiliki wewenang dalam mengatasi diluar batas normal, sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan

Sumber: (Buzan, Wæver &, Wilde, 1998.)

1.7 Argumen Sementara

Pada 2018 banyak negara dan media yang mulai menyoroti kasus ini hingga sekarang. Konflik Uighur ini mendapatkan kecaman dari Internasional yaitu anggota delegasi PBB dan Amerika (BBC, 2020). Mereka menegaskan bahwa yang dilakukan oleh Tiongkok adalah diskriminasi dan penindasan etnis.

Apa yang membuat Tiongkok ditekam adalah bahwa Tiongkok telah melakukan penahanan terhadap 1 juta orang yang kebanyakan dari etnis Uighur di *Re-education* di Xinjiang (Lam, 2017).

Dalam menanggapi tuduhan tersebut, Tiongkok membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan di Xinjiang bukan sebuah kejahatan kemanusiaan melainkan untuk mempertahankan kepentingan nasional di wilayah tersebut serta sebagai bentuk dalam melawan separatisme, terorisme, dan ekstrimisme agama. Dalam mengendalikan situasi di Xinjiang pemerintah Tiongkok berusaha melakukan berbagai usaha secara kemanusiaan namun ditindak secara hukum hingga adanya *Re-education Camp*.

Semenjak didirikannya *Re-education Camp*, kegiatan dari gerakan nasionalis seperti terorisme, separatism, dan ekstrimisme mengalami penurunan dan keadaan di Xinjiang mulai stabil. Selain itu, pendirian kamp ini sangat diperlukan untuk menjauhkan Xinjiang dari segala teror yang mengancam keamanan wilayah dan untuk mencegah ekstremisme agama, terorisme dan separatisme yang berkembang di Xinjiang.

Namun karena adanya *Re-education Camp* tersebut, dunia internasional mendesak untuk menghentikan aktivitas *Re-education Camp*, yang mana 22 delegasi negara di PBB dari Uni Eropa, termasuk Australia, Selandia Baru, Jepang,

dan Kanada telah menandatangani surat yang memprotes kamo *Re-education Camp* di Xinjiang dan mendesak pembubaran kamp tersebut (UN Secretary, 2021).

1.8. Metode penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada tugas akhir ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati maupun dengan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan permasalahan yang akan di teliti tentang **“SEKURITISASI PEMERINTAH TIONGKOK TERHADAP ETNIS UIGHUR DI XINJIANG 2018-2021”** Penulis menetapkan pemerintah Tiongkok sebagai aktor dalam penelitian ini dikarenakan Pemerintah Tiongkok mengeluarkan beberapa pernyataan terkait isu etnis Uighur ini dan sekuritisasi terhadap etnis Uighur menjadi objek dalam penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui buku-buku, jurnal, berita maupun informasi dari penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk memperoleh data.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses peneliti dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yang dirasa layak serta sesuai dalam mencari

sumber data terhadap penelitian ini, serta melihat data data yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dalam proses meneliti, baik dengan data primer & sekunder.



BAB II

Sikap Pemerintah Tiongkok Ditinjau Melalui Kerangka Aktor

Sekuritisasi, *Speech Act*, dan *Referential Object*

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya dalam latar belakang dan landasan teori yang telah dibentuk. Bab ini menganalisis sikap pemerintah Tiongkok yang melakukan sekuritisasi terhadap etnis Uighur yang ditandai dengan adanya aktor sekuritisasi, *Speech Act*, dan *Referential Object* atau pihak yang terancam yaitu pemerintah Tiongkok. Penjelasan dalam tulisan skripsi ini meninjau sikap pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur melalui kerangka aktor sekuritisasi, *Speech Act*, dan *Referential Object*.

Buzan melihat sekuritisasi merupakan salah satu bentuk proses isu yang telah terkonstruksi, sehingga menjadikan isu tersebut sebagai suatu isu keamanan yang sangat penting serta patut diberikan perhatian terhadapnya. Proses mengubah masalah menjadi isu keamanan justru bukan karena adanya ancaman nyata, melainkan dampak dari adanya penekanan masalah yang kemudian dijadikan sebagai suatu ancaman. Adanya aktor sekuritisasi, *Speech Act*, dan *Referential Object* dalam sekuritisasi juga dijadikan sebagai indikator untuk menilai bahwa suatu ancaman mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya.

Dalam memahami *Speech Act* dan *Referential Object* menurut Buzan, perlu adanya hubungan keterkaitan antara bidang dan objek rujukan yang dijelaskan, Sama halnya dalam bidang sosial yaitu objek rujukan dalam bidang ini adalah identitas kolektif seperti negara dan agama. Maka dari itu, ancaman eksistensial

yang ditujukan terhadap suatu negara dan agama bersifat identitas kolektif dapat dikatakan sebagai objek rujukan (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 21-22)

Kemudian, bab ini akan dibagi menjadi dua pembahasan untuk memahami lebih jauh etnis Uighur dan aktor sekuritisasi, *Speech Act* dan *Referential Object* dalam kasus sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang 2018 - 2021.

2.1 *Speech Act & Referential Object*

a. *Speech Act*

Speech Act adalah tindakan untuk mengkonstruksi suatu isu menjadi sebuah ancaman keamanan dengan tujuan untuk menakutkan dan memberi peringatan kepada masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari ancaman tersebut (Buzan, Wæver, and Wilde 1998, hal. 26).

Secara umum *Speech Act* adalah keadaan di mana aktor mengatakan kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengkonstruksi bahwa keadaan/ancaman tersebut memang ada dan dapat diterima oleh pihak lain. Sehingga pihak lain bertindak sesuai dengan apa yang ada dan dapat diterima sesuai dengan instruksi dari aktor yang mengkonstruksi ancaman itu.

Respon terhadap *Speech Act* tidak harus dilakukan dalam tindakan secara langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui ucapan atau dengan cara mereka sendiri. Oleh karena itu, pola *Speech Act* memberikan suatu bentuk normatif terhadap praktik sang aktor. *Speech Act* memiliki relasi yang saling berkesinambungan dengan dua hal lainnya, yaitu perbuatan dan peraturan. hubungan antara dua hal tersebut

adalah, tindakan nyata maupun *Speech Act* merupakan perbuatan yang dibutuhkan oleh manusia dalam membangun sebuah realita (Buzan, Wæver, and Wilde 1998,hal 27).

Jika tindakan tersebut dilakukan secara terus menerus dan konstan, maka akan terbentuk juga sebuah peraturan yang menjadi pedoman dasar perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, peraturan tersebut berisi tentang apa saja yang harus dilakukan. Peraturan menciptakan pemikiran bersama atas suatu tindakan tertentu dan peraturan tidak hanya mempertahankan *Speech Act* tetapi juga mengkorelasikan hubungan antara pembicara dan pendengar (Buzan, Wæver, and Wilde 1998, hal 35).

Selain *Speech Act*, peran masyarakat sebagai audien juga tak kalah penting dalam mekanisme sekuritisasi. Pada dasarnya, sekuritisasi adalah proses intersubjektif dan terkonstruksi secara sosial. Sehingga pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat tentang suatu ancaman akan menjadi tolak ukur bagi kesuksesan sekuritisasi. Dengan begitu jika aktor dari sekuritisasi ini dapat meyakinkan masyarakatnya bahwa isu tersebut merupakan ancaman keamanan bagi keberlangsungan hidup mereka, maka isu tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai ancaman yang nyata.

Dari sini, aktor mendapat restu dan dukungan dari masyarakat untuk membuat kebijakan dan mengambil Tindakan diluar dari mekanisme politik. Jadi, jika masyarakat percaya bahwa suatu isu merupakan ancaman yang nyata maka dapat dikatakan bahwa sekuritisasi tersebut berhasil (Buzan, Wæver, and Wilde, 1998, hal 28).

Dalam kasus isu sekuritisasi terhadap kelompok etnis Uighur berawal ketika Tiongkok berperan sebagai actor yang menyebarkan isu terhadap masyarakat domestik Tiongkok yang mencaip kelompok etnis Uighur sebagai sebuah ancaman keamanan yang membahayakan masyarakat. Pemerintah Tiongkok mulai melakukan sekuritisasi terhadap kelompok etnis Uighur dengan *Speech Act*. Pemerintah Tiongkok memiliki ketakutan berlebihan terhadap kelompok etnis Uighur karena kelompok etnis Uighur sering melakukan aksi-aksi penyerangan terhadap infrastruktur pemerintah dan menciptakan kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Tiongkok tepatnya di kawasan Xinjiang (Subagya.F, 2018.).

Etnis Uighur dicap sebagai kelompok etnis *Three Evils (Terrorism, Separatism, and Religious Extremism)* yang artinya memiliki tiga kejahatan. Perlawanan yang dilakukan kelompok etnis Uighur, dihadapan pemerintah Tiongkok merupakan suatu aksi pemberontakan dan pembangkangan yang dicap berbahaya bagi keamanan bangsa. Pemerintah Tiongkok khawatir terhadap aksi perlawanan yang dilakukan kelompok etnis Uighur akan memicu gerakan-gerakan serupa lainnya di wilayah Tiongkok lainnya. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi stabilitas keamanan di Tiongkok (Giglio, 2004).

Sebab itu etnis Uighur dicap berbahaya bagi keamanan Tiongkok dan keselamatan warga. Dengan alasan itu maka Pemerintah Tiongkok men *Speech Act* masyarakat Tiongkok betapa bahaya dan mengancamnya etnis Uighur. Aksi yang dilakukan etnis Uighur, di mata pemerintah Tiongkok merupakan bentuk pemberontakan dan pembangkangan yang dicap berbahaya bagi integrasi bangsa (Madu et all, 2012).

Dalam kasus besar mengenai sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur ini, dikatakan sebagai respon dari adanya ancaman eksistensial. Karena, dalam sekuritisasi ancaman eksistensial juga dapat ditimbulkan melalui retorika bahasa yang dikenal dengan istilah *Speech Act*. Dalam sekuritisasi untuk memahami *Speech Act* yaitu melalui dua pendekatan berupa internal dan eksternal.

Pendekatan internal, *Speech Act* ditandai melalui bentuk keamanan negara, penggunaan tata bahasa keamanan, dan menciptakan rangkaian peristiwa yang berisi ancaman eksistensial tersebut. Pendekatan ini dijelaskan melalui kalimat berdasarkan paribahasa khusus yang berkaitan dengan sektor-sektor seperti sektor sosial, politik, militer, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian, Pendekatan eksternal ini ditandai dengan dua kondisi utama. *Pertama*, aktor yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan *Speech Act* yaitu memiliki otoritas kuat sebagai aktor sekuritisasi. *Kedua*, adanya objek untuk dijadikan sebagai ancaman (Buzan dkk, 1998, hal. 32-33).

Dalam memahami lebih jauh mengenai *Speech Act*, dijelaskan oleh Buzan dkk bahwa *Speech Act* juga biasanya berbicara mengenai keberlangsungan hidup. Dimana ada tindakan yang menjadikan isu tersebut sebagai prioritas sehingga “*jika masalahnya tidak ditangani sekarang, itu akan terlambat, dan tidak akan ada untuk memperbaiki kegagalan kita*” (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24).

Pemerintah Tiongkok mengelak dan tetap melakukan *Speech Act* yang bertujuan bahwa mereka murni mempertahankan keamanan negaranya dari serangan teroris dengan tetap menjaga hak- hak yang dimiliki oleh etnis Uighur,

berikut adalah *Speech Act* yang disampaikan oleh Hu Lianhe, ketua partai komunis Tiongkok dalam sidang panel PBB.

“There is no such thing as re-education camp,” said Hu Lianhe, a senior Tiongkok Communist Party official “There is no torture, persecution or disappearance of repatriated personnel,” he said in response to questions about the fate of hundreds of Uighurs who had returned to Xinjiang, some of whom were reported to have died or to have disappeared. Government did not target any ethnic minority, Mr. Hu said” they {Uighurs} lived in peace and enjoying freedom of religious belief. The authorities have clamped down on violent terrorist activity and strengthened “security and social management,” he said, acknowledging only that minor criminals were provided with “assistance and education to assist them in their rehabilitation.” Hu Lianhe. (Cumming-Bruce 2018).

Pernyataan Hu Lianhe ini disampaikan saat Pemerintah Tiongkok ditekan oleh seluruh perwakilan negara dalam sidang panel PBB terkait isu diskriminasi dan pelanggaran HAM oleh pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur. Dalam *statement* tersebut, terdapat kalimat yang ditujukan untuk orang-orang dalam sidang tersebut. Hu Lianhe mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok tidak melakukan diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas Uighur dan tetap menjaga perdamaian, hak-hak dan kebebasan mereka dalam beragama, namun mereka pemerintah Tiongkok bertindak terhadap tindakan yang mengancam keamanan negara dan usaha terorisme, ekstrimis, dan separatis.

Oleh karena itu pernyataan Hu Lianhe telah menggiring opini publik atau stereotip yang buruk terhadap aksi teroris, ekstrimis, dan separatis etnis Uighur serta menjustifikasi bahwa mereka tetap menegakkan HAM dan memberikan kebebasan kepada seluruh minoritas yang tinggal di Republik Rakyat Tiongkok. Hu Lianhe secara spesifik menunjuk bahwa orang-orang Uighur adalah pelaku terorisme dan berpotensi membahayakan keamanan negara.

They (Uighurs) enjoyed full rights but we (Government) committed to those deceived by religious extremism, shall be assisted by resettlement and re-education (BBC News,2018).

Dalam sidang komite penghapusan diskriminasi di Geneva delegasi Tiongkok menekankan bahwa etnis Uighur mendapatkan seluruh haknya namun mereka menekankan bahwa untuk mereka Uighur yang mempunyai ideologi ekstrimisme agama akan ditindak dan diberikan bimbingan dan penempatan. *Statement* yang diucapkan oleh delegasi Tiongkok menekankan bahwa mereka tidak melakukan tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM, namun disisi lain mereka juga sangat menitikberatkan tindakan terorisme yang dilakukan etnis Uighur yang sangat mengancam keamanan Tiongkok.

Government recent amendments to the legal framework appeared designed to enable even greater control of Xinjiang, Uyghur, and other minority groups. The criminal law amendments, the National Security Law of 2015, the Counter-Terrorism Law of 2016, the Cybersecurity Law of 2017, and the Religious Affairs Regulations Law amended in 2018, established imprecise and too broad definitions on national security offences related to terrorism and extremism that enabled abusive, arbitrary and discriminative prosecution and conviction.(OHCHR | Committee on the Elimination of Racial Discrimination Reviews the Report of China 2020)

Dalam sidang di Geneva juga dijelaskan bahwa pemerintah Tiongkok menerapkan amandemen pada peraturan pemerintahnya di mana berfokus untuk melawan teroris dan mengontrol etnis minoritas terkhusus Muslim dalam beragama untuk menghindari potensi terjadinya ideologi radikal dan terjadinya terorisme, ekstrimisme, dan separatisme. Maka seperti yang telah Buzan dkk jelaskan bahwa adanya *Speech Act* yaitu untuk melindungi keberlangsungan hidup.

Keberlangsungan hidup yang dimaksud di sini adalah kedaulatan negaranya. Tiongkok masih melihat keamanan melalui sudut pandang yang tradisional, yaitu negara adalah satu satunya yang dilindungi (Buzan, Wæver, and Wilde 1998, hal 27).

b. Referential Object

Referential Object adalah Objek referensi hal-hal yang terlihat terancam secara eksistensial dan yang memiliki klaim sah untuk bertahan hidup atau aktor yang merasa terancam dan sadar harus meminta keamanan (Buzan, Wæver, and Wilde 1998, hal 27).

Dengan menyatakan bahwa objek referensi tertentu terancam keberadaan di dalamnya, maka aktor sekuritisasi mempunyai wewenang dalam melakukan tindakan di luar batas norma untuk memastikan kelangsungan hidup objek referensi. Tindakan inilah yang dianggap sebagai tindakan keamanan yaitu atas dasar ketakutan '*di mana akan ada pihak lain yang membunuh kita*' sebagai subjek dorongan dalam melakukan tindakan tersebut (Buzan, Wæver, and Wilde 1998,hal 29).

Tiongkok mempunyai beberapa etnis minoritas di dalamnya, namun etnis Uighur yang menjadi sorotan utamanya, karena mereka dicap memiliki tradisi separatisme yang dianggap membahayakan kedaulatan Tiongkok. Etnis Uighur telah melakukan aksi penyerangan sejak masa dinasti Qing hingga masa pemerintahan Tiongkok saat ini. Namun ada perbedaan dalam aksi penyerangan yang dilakukan etnis Uighur (Dwyer, 2005).

Penyerangan yang dilakukan etnis Uighur disebabkan karena terjadinya praktek represif dan diskriminatif terhadap mereka. Pemerintah Tiongkok memang selama ini bersikap keras dalam menangani berbagai kerusuhan di Xinjiang. Pemerintah memilih penanganan kasus etnis minoritas di Xinjiang itu dieliminasi secara agresif melalui agresi militer. Berbagai kebijakan tersebut tercipta antara lain terjadinya genosida atau *Ethnic Cleansing*, bahkan wanita dan anak-anak ikut menjadi korban. Tiongkok melakukan tindakan represif dengan alasan utama menyangkut kepentingan nasional Tiongkok yaitu keutuhan wilayah.

Hal yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah Tiongkok mengingat keutuhan wilayah ialah bagian kedaulatan negara yang tidak dapat dielakan oleh negara manapun, ditambah wilayah Xinjiang memang sangat bernilai penting bagi Tiongkok (Karisma, 2018). Xinjiang bernilai sangat ekonomis. Terutama sejak penemuan sumber minyak yang menambah posisi Xinjiang secara geoekonomi menjadi lebih penting dan merupakan salah satu wilayah paling vital bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tentu tidak mau melepaskan wilayah ini begitu saja.

Xinjiang merupakan penghasil terbesar kapas, lavender, dan hop. Area tanaman lavender dan produksinya di daerah Ili mencapai 90% dari total tanaman nasional. Sedangkan savana terbesar kedua yaitu Xinjiang merupakan salah satu daerah peternakan domba wol yang menjadi pusat produksi di Tiongkok. Xinjiang juga kaya akan sumber daya energi. Wilayah ini memiliki cadangan minyak, gas alam dan batu bara besar di dalam negeri. Diketahui cadangan batu bara sebesar 40% dari total negara. Kuota cadangan minyak temuan dan gas di Tarim, Junggar, dan Turpan-Hami wilayah Xinjiang mencapai sepertiga dari total negara. Xinjiang

juga memiliki sumber daya mineral yang besar. Ada lebih dari 130 jenis deposit mineral berada. Cadangan beryllium and mica di wilayah adalah yang tertinggi di Tiongkok (HKTDC, 2020).

Berdasarkan hasil ekonomi dari wilayah Xinjiang, penting bagi pemerintah Tiongkok untuk mengamankan wilayah Xinjiang terutama dengan menjaga Xinjiang tetap dalam wilayah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tidak akan membiarkan Xinjiang lepas dari Tiongkok dan akan mempertahankan keutuhan wilayah Tiongkok (Widjajnto, 2001).

Xinjiang memang sangat penting terutama karena wilayah ini merupakan wilayah penyangga atau *Buffer Zone* bagi Tiongkok. Xinjiang tidak bisa dilihat sebagai bagian dari Tiongkok saja tapi juga merupakan bagian dari Asia Tengah. Wilayah ini menjadi semakin penting karena letaknya yang berbatasan dengan Asia Tengah. Xinjiang yang tidak stabil tentu akan mengganggu Tiongkok. Wilayah ini sangat rentan karna bisa meningkatkan angka *Illegal Trafficking* seperti penyelundupan senjata dan *Human Trafficking* dari dan menuju Asia Tengah. Di samping itu, dengan berkembangnya isu terorisme menyebabkan kawasan Xinjiang sangat penting dijaga agar tidak mudah menjadi pintu masuk teroris ke wilayah Tiongkok (Brown, Michael.E, 2001).

Potensi yang dimiliki oleh Xinjiang menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi wilayah tersebut sekaligus sebuah jembatan bagi Tiongkok untuk memajukan perekonomiannya di masa depan. Mencakup lebih dari 1,6 juta km², kekayaan Xinjiang seperenam dari seluruh wilayah Tiongkok. Oleh sebab itu, pemerintah Tiongkok bersikeras untuk tidak melepaskan Xinjiang meskipun penduduk Xinjiang (etnis Uighur) berusaha melepaskan diri dari Tiongkok, karena dilihat dari

minyak saja sejak tahun 1993, Tiongkok menjadi importir minyak dan diperkirakan pada tahun 2009 hanya 40% kebutuhan minyak Tiongkok dapat dipenuhi di dalam negeri, sisanya 60% diperoleh dari tempat lain yaitu Timur Tengah. Melalui wilayah Timur Tengah ini, Tiongkok berhasil mengimpor 44% dari total impor minyak pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2015 impor minyak mengalami peningkatan hingga 70%. Xinjiang yang merupakan wilayah dengan kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah menjadi sebuah keistimewaan dan andalan bagi Tiongkok (Hermawan, 2001).

Pemain yang melakukan sekuritisasi disebut sebagai *Securitizing Actors*. Aktor didefinisikan oleh Buzan dkk sebagai, “*who securitize issues by declaring something – a referent object – existentially threatened.*” (Buzan dkk, 1998, hal. 214) *Referent Object* merupakan suatu objek (negara atau masyarakat) yang dilihat secara eksistensial terancam dan harus diamankan.

Merujuk kepada Buzan dkk, Buzan dkk berkata “*if a Multisector approach to security was to be fully meaningful, referent objects other than the state had to be allowed into the picture*” (Buzan et al, 1993, hal. 24), dalam penjelasan secara jelasnya menurut Buzan dkk bahwasanya *Referent Object* merujuk kepada negara sebagai objek dan kedaulatan sebagai nilai yang diamankan, oleh karena itu posisi kedaulatan Tiongkok disini sebagai objek yang harus diamankan .

Weaver juga mengungkapkan dalam bukunya “*it seems reasonable to be conservative along this (referent object) axis, accepting that “security” is influenced in important ways by dynamics at the level of individuals and the global system, but not by propagating unclear terms such as individual security and global security*” (Buzan dkk, 2009, hal. 50.)

Keberhasilan aktor dalam menkonstruksi suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan isu keamanan. Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Buzan dkk yang dikenal sebagai sekuritisasi, dan Tiongkok berhasil membuat *Referential Object* dan sukses menjalankan agenda sekuritisasi terhadap etnis Uighur di Xinjiang.

Berdasarkan konflik yang terjadi di Xinjiang dan berbagai macam aksi penyerangan yang dilakukan oleh etnis Uighur membuat pemerintah Tiongkok melakukan tindakan represif dan diskriminatif terhadap etnis Uighur. Setelah pemerintah Tiongkok melakukan *Speech Act* dan berposisi sebagai *Referential Object* pemerintah Tiongkok akan melakukan langkah sekuritisasi yang dibagi menjadi tiga komponen yaitu *Existential Threat*, *Emergency Action*, dan *Effect in Inter-Unit Relations by Breaking Free of Rules* akan dibahas di bab selanjutnya.

BAB III

Existential Threat, Emergency Action, Breaking Free Of Rules:

Sekuritisasi Terhadap Etnis Uighur di Xijiang

Mengingat pada bab sebelumnya, pembentukan wacana *sekuritisasi etnis Uighur* dalam konsep sekuritisasi dari Buzan dkk merupakan langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang yang mayoritas penduduk Muslim. Dijelaskan melalui analisis yang ditandai dengan adanya *Speech Act* dan *Referential Object* melalui kerangka aktor. Sama halnya dengan yang diutarakan oleh Buzan dkk dalam sekuritisasi dan dijelaskan bahwa *Speech act* bisa terjadi melalui bentuk keamanan, tata bahasa keamanan, dan membangun rangkaian peristiwa yang mencakup ancaman eksistensial tersebut (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 32-33).

Sedangkan *Referential Object* merupakan objek yang harus dilindungi yaitu negara dan kedaulatannya (Buzan et.al.1993, hal 24) Maka dari itu, beberapa *Speech Act*, *Referential Object*, dan data yang didapat pada bab sebelumnya telah membuktikan bahwa kasus sekuritisasi terhadap etnis Uighur di Xinjiang termasuk ke dalam langkah sekuritisasi Tiongkok.

Namun, tidak berhenti sampai *Speech Act* dan *Referential Object*. Menurut Buzan dkk, terdapat tiga komponen yang juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam pembentukan langkah sekuritisasi. Oleh karna itu, dalam bab ini peneliti menganalisa tiga komponen lain yang menjadi penjelasan selanjutnya yaitu *Existensial Threat* sebagai ancaman yang ada dan mengancam Tiongkok dan kedaulatannya, *Emergency Action* sebagai tindakan darurat yang dilakukan oleh

Tiongkok dengan melakukan penahanan samapai pemberantasan tindakan ekstrimis, terorisisme, dan separatisme sehingga menimbulkan pelanggaran norma dimana seharusnya Tiongkok menjunjung HAM bagi seluruh rakyatnya termasuk etnis Uighur itu sendiri akan tetapi sekuritisasi dijadikan sebagai tameng oleh pemerintah Tiongkok. Pelanggaran ini disebut *Breaking Free of Rules* sehingga dapat dilegitimasi akibat terkosntruknya isu keamanan.

3.1 *Existential Threat*: Ancaman Terhadap Eksistensi Kedaulatan dan Keamanan Tiongkok

Buzan dkk menyimpulkan adanya tiga level analisis dalam sekuritisasi yaitu *Existential Threat* (ancaman eksistensial), *Emergency Action* (tindakan darurat) dan *Breaking Free of Rules* (efek pada hubungan antar-unit dengan melanggar aturan) (Buzan, Wæver, and Wilde 1998, hal. 25).

Sebuah konsep ancaman dapat dikatakan terbentuk berdasarkan proses eksistensial ketika sebuah opini publik mengenai sebuah ancaman tersebut tidak dikonstruksioleh aktor tersebut, melainkan hasil dari kesadaran sendiri. Ancaman yang ada melalui proses eksistensial sebagai ancaman tanpa adanya aktor tertentu yang mencoba menkontruksi opini masyarakat (Buzan et all, 1998, hal. 35).

Sedangkan melalui proses inter-subjektif berarti sebuah ancaman dibentuk oleh seorang aktor yang memiliki kepentingan untuk mengonstruksi opini publik tentang apayang pantas disebut sebagai ancaman tersebut adalah sekuritisasi terhadap eitnis Uighur di provinsi Xinjiang, Tiongkok.

Proses mengubah masalah menjadi isu keamanan justru bukan karena adanya ancaman nyata, melainkan dampak dari adanya penekanan masalah yang

kemudian dijadikan sebagai suatu ancaman. Dalam menggambarkan kasus sekuritisasi Buzan dkk juga menjelaskan melalui posisi suatu Negara, melihat isu tersebut yang dijadikan bagian dari kebijakan publik. Maka dari itu, memerlukan keputusan dari pemerintah untuk kemudian isu tersebut dibentuk dan dijadikan sebagai ancaman eksistensial. Sehingga perlu untuk ditindak lanjuti dengan langkah darurat serta pengakuan diluar proses politik secara umum (Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d., 1998, hal. 23-24).

Perihal etnis Uighur membuat Pemerintah Tiongkok semakin sering melakukan segala cara untuk mempengaruhi masyarakat luas. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan menggambarkan etnis Uighur sebagai ancaman jahat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan kepentingan bangsa. Etnis Uighur disebut sebagai “*Three Evils*” sebagai representasi separatisme, ekstrimisme dan terorisme yang dapat membahayakan tidak hanya bagi negara Tiongkok namun juga mengancam dunia. Pemerintah Tiongkok terus melakukan tindakan dengan kampanye anti *Three Evils*. Hal ini dilakukan untuk membentuk kepercayaan publik bahwa etnis Uighur merupakan musuh dalam negara yang berbahaya.

Namun ancaman baru ternyata datang bukan dari dalam negeri saja melainkan dari negara lain yaitu Kanada, Uni Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terkoordinasi dan bilateral terhadap pejabat pemerintah Tiongkok yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk kejahatan internasional di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang.

Pada bulan September, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengatakan dia menyesali bahwa pihak berwenang tidak

mengizinkan akses yang berarti ke Xinjiang, mengatakan bahwa kantornya mengeluarkan penilaian hak asasi manusia di wilayah tersebut. Pengumumannya dinyatakan menyusul deklarasi keprihatinan bersama oleh 44 negara pada pertemuan ke-47 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Pernyataan serupa dibuat oleh 43 negara di Majelis Umum PBB pada Oktober 2021. 4.444 anggota parlemen dari Belgia, Kanada, Republik Ceko, Lithuania, Belanda, dan Inggris telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk genosida pemerintah Tiongkok terhadap warga Uighur. Beberapa juga mendesak pemerintah untuk membatasi partisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.

Parlemen Inggris telah meloloskan mosi tidak mengikat yang mendukung boikot diplomatik Olimpiade 2022 Beijing. Anggota Parlemen Eropa telah menanggapi usulan perjanjian investasi komprehensif UE dengan Tiongkok karena masalah hak asasi manusia dan telah menanggapi pengawasan terhadap perjanjian tersebut. Pada bulan September, mereka juga mengadopsi rekomendasi strategi UE yang baru, lebih proaktif dan lebih kolaboratif terhadap Tiongkok, dengan fokus pada hak asasi manusia (HRW, 2022).

Tiongkok dan negara-negara barat terutama Amerika Serikat adalah mitra dagang yang saling menguntungkan, dimana mereka akan terus berusaha untuk saling menjalin hubungan dalam sektor ekonomi tentunya akan sangat rugi bagi keduanya, terutama Tiongkok jika adanya boikot terhadap produk mereka yang ditujukan untuk pasar Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya karena keputusan Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB atas genosida yang dilakukan pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.

Pada tahun 2020 – 2021 ekspor Uni Eropa ke Tiongkok naik 2,2% sedangkan impor Tiongkok ke Uni Eropa naik 5,6% dilansir dari (Eurostat). Oleh karena itu adanya ancaman dari AS dan Uni Eropa merupakan sebuah *Existential Threat* terhadap Tiongkok sendiri karna hubungan dagang keduanya terdampak karena tuduhan genosida oleh negara – negara barat yang berakibat sanksi untuk Tiongkok.

Sekuritisasi merupakan tindakan pemerintah Tiongkok dimana memiliki alasan mutlak untuk memberantas *Terrorism, Separatism, and Extrimism* bukan ditujukan untuk genosida etnis Uighur, dalam konsep sekuritisasi dijelaskan, isu keamanan terkonstruk tidak melalui ancaman nyata melainkan dari adanya penekanan masalah yang menjadi langkah politisasi kemudian dijadikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan adanya langkah darurat dan langkah tersebut dapat melewati batas normal di dalam prosedur politik (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24).

3.2. *Emergency Action: Counter Of Terrorism Etnis Uighur di Camp Re-Education, dan Shanghai Cooperation Organization Sebagai Usaha melawan Three Evils*

Penjelasan sekuritisasi tentang ancaman eksistensial yang kemudian dapat memungkinkan untuk dijadikan sebagai kerangka pembentukan kebijakan. Sehingga melegitimasi tindakan darurat di luar batas bisa dilakukan dengan cara menimbang dan mendiskusikan gagasan-gagasan dalam ancaman eksistensial yang cukup. *Emergency action* yang diambil oleh aktor sekuritisasi sebagai langkah

penanganan ancaman eksistensial merupakan hasil adopsi secara darurat, terpaksa dan unilateral atau sepihak (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 25).

Dalam subbab ini akan dijelaskan mengenai terbentuknya langkah darurat oleh pemerintah Tiongkok dalam penanganan aksi terorisme, ekstrimisme, dan separatisme dengan memprioritaskan kontrol dan pengawasan penuh terhadap aktivitas etnis Uighur setiap hari dan dukungan dari SCO sebagai organisasi yang bertujuan memberantas terorisme yang merupakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Merujuk perkataan Buzan dkk, sekuritisasi merupakan masalah yang kemudian dibentuk dan didramatisasi dengan memfokuskan masalah tersebut sebagai prioritas paling tinggi, sehingga aktor dalam sekuritisasi memiliki wewenang untuk melanggar peraturan diluar batas (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 26).

Tiongkok sampai saat ini terus menekankan bahwa hal yang paling utama adalah memberantas *Terorism*, ini menunjukkan bahwa kepentingan utama Tiongkok adalah keamanan dan kedaulatan, sehingga Tiongkok tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari Tiongkok. Xinjiang bernilai sangat ekonomis, terutama sejak penemuan ladang minyak yang menambah posisi Xinjiang secara geoekonomi lebih penting dan merupakan wilayah paling berharga bagi Tiongkok. Dilansir dari *HKTDC Research*, Xinjiang juga merupakan penghasil terbesar kapas dan lavender. Pemerintah Tiongkok tentu tidak mau melepaskan wilayah ini begitu saja (Dillon, 2013).

Hui dan Uighur adalah dua etnis Muslim terbesar di Tiongkok, keduanya memiliki lebih dari 10 juta orang. Islamofobia dan permusuhan umum terhadap Muslim di Tiongkok telah dimulai sejak 1990an. Setelah kejadian aksi bom WTC

9/11, Amerika Serikat melancarkan perang melawan terorisme yang mencakup domestik dan internasional, sehingga memberi Tiongkok alasan untuk membenarkan tindakannya sendiri terhadap ancaman dari separatis Uighur sebagai bagian dari gerakan terorisme global yang lebih besar (Aini, 2019).

Pemerintah Tiongkok menerapkan aturan khusus. Aturan khusus tersebut membatasi adanya pergerakan dari Uighur. Dimulai dengan penempatan angkatan bersenjata, hingga kamera pengintai dengan teknologi tinggi untuk memastikan setiap kegiatan Uighur dapat diawasi. Dan pemerintah juga menahan beberapa Uighur tanpa adanya peradilan melalui program yang disebut sebagai program *re-education*. Pada program tersebut, Uighur dipekerjakan secara paksa dan pemerintah Tiongkok menyatakan program tersebut ada untuk mengasah kemampuan dan keterampilan Uighur (Garside & Harrison, 2019).

Pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan-kebijakan dan sanksi-sanksi hukum untuk mengendalikan kegiatan keagamaan dan aktivitas Etnis Uighur lainnya. Etnis Uighur diawasi oleh pasukan militer Pemerintah Tiongkok dengan berbagai kamera yang terpasang di setiap sudut provinsi Xinjiang, dipantau melalui komputer dan aktivitas sponselnya (Human Rights Watch, 2020).

Tiongkok menggunakan strategi kemitraan keamanan kawasan melalui kerja sama multilateral SCO dengan basis doktrin melawan "*Three Evils*" yang diterapkan melalui mekanisme multilateral yang dapat mencegah dan mengelola permasalahan "*Three Evils*," diantaranya dengan menyepakati Konvensi Shanghai Melawan Ekstrimis, Separatis, dan Terorisme sebagai kerangka kerja resmi yang mengikat Tiongkok dan negara anggota SCO lainnya untuk aktif terlibat dalam melawan "*Three Evils*." Membentuk basis pusat perlawanan terorisme (Regional

Anti-Terrorism Structure, RATS) di Tashkent, melakukan latihan militer bersama, dan pemberian bantuan dalam aspek ekonomi serta militer dengan negara anggota SCO (Aris, Stephen. 2013). Penggunaan strategi kerja sama kawasan yang digunakan Tiongkok dalam menangani aksi separatistis di Xinjiang sejalan dengan prinsip “dunia harmonis” yang menekankan pentingnya penggunaan kerja sama multilateral dalam menciptakan kestabilan keamanan demi terciptanya dunia yang harmonis.

Anggota SCO melakukan latihan militer bersama setiap tiga kali setahun, dimana Tiongkok dan Rusia lebih sering melakukan latihan militer bersama dibanding negara anggota SCO lainnya, *Antiterror & Peace Mission* adalah nama dari latihan militer yang mereka lakukan dimana militer, intelejen, pasukan khusus, dan penegak hukum ikut terlibat dalam latihan militer tersebut. Adanya SCO membuat negara anggotanya menjadi lebih efisien dalam menangani terorisme karena anggota lain mendukung penuh tindakan melawan “*Three Evils*” yang mengancam keamanan negara mereka (Xiandong, Zhao. 2012).

Buzan dkk menyatakan sekuritisasi bersifat inter-subjektif dan dikonstruksi secara sosial. *Referential Object* memiliki legitimasi umum sebagai hal yang harus ada, dengan syarat bahwa aktor yang dapat merujuknya kemudian menunjuk pada sesuatu sebagai ancaman. Dengan demikian akan memanipulasi orang lain untuk mengikuti atau setidaknya mentolerir perbuatan diluar batas tersebut. Mereka yg merupakan aktor akan memegang kekuasaan untuk mengeksploitasi suatu ancaman karena dengan seperti itu mereka memiliki hak untuk mengontrol setiap tindakan yang tidak sesuai batas normal. Keberhasilan sekuritisasi juga tidak hanya didukung oleh figure suatu aktor, melainkan apa

yang keluar dari mulut mereka mengarah pada masalah keamanannya (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 31).

Dalam sekuritisasi juga dijelaskan mengenai hak aktor sekuritisasi dalam mengklaim dan menangani masalah diluar batas norma sehingga dapat melanggar prosedur politik yang berlaku. Sehingga aktor akan melanggar aturan jika melihat ancaman tersebut sebagai sesuatu yang sudah tidak bisa ditangani oleh pihak manapun secara umumnya. Pelanggaran yang dilakukan disebut juga dengan tindakan keamanan didasarkan oleh rasa ketakutan terhadap pihak lain yang mengancam hidup. Kemudian hal ini yang dijadikan sebagai motivasi dasar dalam melakukan tindakan tersebut (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24).

Penahanan dan pengawasan terhadap etnis Uighur menunjukkan bahwa dalam penanganan masalah penanggulangan aksi terorisme, ekstrimisme, dan separatism terkait keamanan Tiongkok telah mencapai pada luar batas normal dan pemberlakuan sanksi balik terhadap AS dan EU merupakan tindakan darurat bahwa pemerintah Tiongkok tidak berdiam diri dan menerima sanksi karena pemerintah Tiongkok memiliki justifikasi dimana sekuritisasi yang mereka terapkan semata-mata sebagai *counter of terrorism*. Di dalam upaya penanggulangan tindak terorisme itu didasarkan pada potensi serangan teror yang terjadi di negaranya. Kemudian untuk menunjukkan bahwa adanya respon terhadap masalah kedaulatan dan proteksi diri secara darurat yaitu tidak diberikanya HAM bagi etnis Uighur untuk mendapatkan *freedom of live, freedom from fear, dan freedom of live in dignity*.

Dalam konsep sekuritisasi jika tidak segera mengatasi permasalahan tersebut, tentunya akan berdampak terhadap lainnya sehingga tidak akan relevan (karena kita tidak akan berada di sini atau tidak akan bebas untuk menanganinya

dengan cara kita sendiri). Dengan begitu, aktor sudah mengklaim hak untuk menangani masalah ini melalui cara yang diluar batas normal untuk melanggar aturan politik normal dari konsep sekuritisasi (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24).

Melalui Penahanan dan pengawasan etnis Uighur inilah Pemerintah Tiongkok memberikan hak untuk menggunakan penahanan dan pengawasan juga sebagai aktor sekuritisasi yang dapat mengklaim terkait langkah atau tindakan darurat dalam penanganan kasus teorisme, ekstrimisme, dan separatisme.

3.3. *Breaking Free Of Rules*: Pelanggaran Aturan Terhadap Tindakan Sekuritisasi Etnis Uighur

Mengenai konsep sekuritisasi Buzan dkk, dijelaskan bahwa terjadinya *breaking free of rules* ketika adanya pernyataan dari aktor sekuritisasi terkait isu keamanan dijadikan sebagai prioritas utama dalam keadaan *emergency* akibat ancaman eksistensial. Dengan begitu aktor sekuritisasi sudah berhasil mengklaim dan membebaskan diri dari adanya prosedur dan aturan yang akan terikat sehingga terbentuknya isu sekuritisasi. Namun, untuk menyederhanakan definisi *breaking free of rules* atau pelanggaran aturan yaitu upaya dalam penanganan masalah yang dilakukan diluar batas normal dengan membenarkan pelanggaran dalam aturan (Buzan, Wæver & Wilde, 1998, hal. 24-25).

Telah dijelaskan oleh Buzan dkk bahwa tindakan diluar batas dapat berarti juga sebagai tindakan pelanggaran terhadap suatu aturan. Sama halnya dengan implementasi penerapan sekuritisasi terhadap etnis Uighur dimana pemerintah Tiongkok menahan dan mengontrol semua aktivitas mereka, tidak terlepas dari

adanya pelanggaran terhadap aturan maupun norma lainnya. Terdapat dua pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok melalui *Sekuritisasi* yaitu pelanggaran diskriminasi dan HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang dan *Ethnic cleansing* (USHMM, 2021).

Dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) 1948 melalui resolusi 271 A (III) , pasal I dijelaskan bahwa “*semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai mabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan* (Duham, 1948).

Dalam *Article 3 (1)* menjelaskan bahwa ketentuan deklarasi hak asasi manusia ini berlaku bagi semua manusia yang ada di bumi dan tidak boleh dengan mendiskriminasi ras, agama atau negara asal. Pada realitanya *Sekuritisasi*, justru bertolak belakang dengan aturan dalam pasal yang diatur dalam deklarasi hak asasi manusia. *Sekuritisasi* tersebut mengandung unsur perlakuan di mana etnis Uighur tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia dan sebagai rakyat Tiongkok sendiri . Selain itu, beberapa *Speech Act* yang telah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok juga dapat dijadikan bukti bahwa Tiongkok memicu munculnya sentimen anti-terorism di Tiongkok. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *Sekuritisasi* tidak sejalan dengan deklarasi HAM tahun 1948 UHCHR pasal 3 ayat 1.

Pasal II dalam deklarasi hak asasi manusia menjelaskan juga “*Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian seperti pembedaan ras, politik, warna kulit, gender, bahasa, kepercayaan, atau pandangan lain, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain di dunia* (Duham. 1948.).

Dalam *Article 3 (2)* menjelaskan bahwa ketentuan deklarasi hak asasi manusia ini berlaku bagi semua manusia yang ada di bumi dan tidak boleh dengan mendiskriminasi ras, agama atau negara asal. Pada realitanya *Sekuritisasi*, justru bertolak belakang dengan aturan dalam pasal yang diatur dalam deklarasi hak asasi manusia. *Sekuritisasi* tersebut mengandung unsur perlakuan di mana etnis Uighur tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia dan sebagai rakyat Tiongkok sendiri. Selain itu, beberapa *Speech Act* yang telah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok juga dapat dijadikan bukti bahwa Tiongkok mengindahkan dengan melakukan diskriminasi berupa penahanan dan pengawasan karena adanya perbedaan ras, agama, dan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *Sekuritasi* tidak sejalan dengan deklarasi HAM tahun 1948 UHCHR pasal 3 ayat 2.

Pasal V dalam deklarasi hak asasi manusia menjelaskan juga “*tidak seorangpun boleh disiksa ataupun diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi dan dihina* (Duham. 1948.)”.

Dalam *Article 3 (5)* menjelaskan bahwa ketentuan deklarasi hak asasi manusia ini berlaku bagi semua manusia yang ada di bumi dan tidak boleh dengan menyiksa, diperlakukan secara kejam, dan dihina. Pada realitanya *Sekuritisasi*, justru bertolak belakang dengan aturan dalam pasal yang diatur dalam deklarasi hak asasi manusia. *Sekuritisasi* tersebut mengandung unsur perlakuan di mana etnis Uighur tidak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang manusia dan sebagai rakyat Tiongkok sendiri. Selain itu, beberapa *Speech Act* yang telah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok juga dapat dijadikan bukti bahwa Tiongkok mengindahkan dengan melakukan kekejaman, penyiksaan, dan penghinaan terhadap etnis Uighur.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *Sekuritasi* tidak sejalan dengan deklarasi HAM tahun 1948 UHCHR pasal 3 ayat 2.

Pasal VII dalam deklarasi hak asasi manusia menjelaskan juga “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua manusia berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini*” ((Duham, 1948.).

Dalam *Article 3 (7)* menjelaskan bahwa ketentuan deklarasi hak asasi manusia ini berlaku bagi semua manusia yang ada di bumi berhak mendapatkan perlindungan yang sama atas diskriminasi. Pada realitanya *Sekuritisasi*, justru bertolak belakang dengan aturan dalam pasal yang diatur dalam deklarasi hak asasi manusia. *Sekuritisasi* tersebut mengandung unsur perlakuan di mana etnis Uighur tidak mendapatkan perlindungan hukum dari diskriminasi etnis Han sebagai seorang manusia dan sebagai rakyat Tiongkok sendiri. Selain itu, beberapa *Speech Act* yang telah disampaikan oleh pemerintah Tiongkok juga dapat dijadikan bukti bahwa Tiongkok malah memojokan dan bertindak represif terhadap etnis Uighur. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *Sekuritasi* tidak sejalan dengan deklarasi HAM tahun 1948 UHCHR pasal 3 ayat 2.

Merujuk pada setiap pasal yang sudah disebutkan di atas dimana menjelaskan perihal hak asasi manusia, rasisme, dan tindakan kekerasan yang sudah ditetapkan oleh DUHAM 1948, dan melihat tindakan pemerintah Tiongkok yang melakukan pelanggaran HAM, rasisme, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap etnis

Uighur yang melanggar pasal di DUHAM 1948, pemerintah Tiongkok jelas melakukan tindakan *Effect inter-Unit by Breaking Free of Rules* untuk menyempurnakan proses *Securitisazion* terhadap etnis Uighur, sesuai apa yang dijelaskan menurut Buzan dkk bahwa:

'Security' is a move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics. In theory, any public issue can be assumed on the spectrum from non-politicized (meaning the state does not deal with it and it is not in any other way made an issue of public debate and decision) through politicized (meaning the issue is a part of public policy, requiring government decision and recourse allocation or mere rarely, some other form of communal governance) to securitize (meaning the issue is presented as an existential threat, requiring emergency measures and justifying actions outside the normal bounds of political procedure). (Buzan et al. 1998: 23)

Secara ringkas analisis sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2 Komponen dalam implementasi sekuritisasi etnis Uighur dalam Konsep *Securitisasion*

Langkah sekuritisasi	Definisi Buzan dkk	Aplikasi teori
Existential Threat /Ancaman Eksistensial	Ancaman yang diwacanakan oleh aktor sekuritisasi sehingga dapat dikatakan isu sekuritisasi.	Munculnya seperatis yang menjadi perjuangan suku Uighur dipengaruhi oleh kelompok teroris untuk melepaskan diri dari Tiongkok. Ketakutan pemerintah Tiongkok terhadap tindakan terorisme, ekstrimisme, dan separatis etnis Uighur. Ancaman dan sanksi yang di jatuhkan kepada Tiongkok oleh negara barat Amerika serikat, dan Uni Eropa

Emergency Action/Langkah Darurat	Tindakan yang diambil oleh aktor untuk mengatasi ancaman eksistensial yang dilakukan aktor diadopsi secara darurat, terpaksa dan sifatnya bisa di cabut dan unilateral.	<p>pemerintah Tiongkok menerapkan aturan khusus. Aturan khusus tersebut membatasi adanya pergerakan dari Uighur.</p> <p>Penempatan angkatan bersenjata di wilayah Xinjiang.</p> <p>kamera pengintai teknologi tinggi untuk mengawasi setiap kegiatan warga Uighur agar terawasi.</p> <p>Dibuatnya kamp re-edukasi untuk Uighur Xinjiang dengan tujuan menghilangkan doktrin <i>Three Evils</i> oleh pemerintah Tiongkok.</p> <p><i>Antiterror & Peace Mission</i> sebagai upaya melawan <i>Three Evils</i> dengan adanya latihan rutin bersama semua anggota SCO dan dukungan semua negara anggota melawan <i>Three Evils</i>.</p>
Breaking free of rules/pelanggaran aturan	Kondisi di mana aktor sekuritisasi mengklaim memiliki wewenang dalam mengatasi masalah diluar batas normal. Sehingga menjustifikasi pelanggaran aturan.	<p>Pemerintah Tiongkok telah melakukan penahanan 1 juta Uighur di kamp pengasingan tanpa mengindahkan HAM serta Tiongkok telah bertindak represif, tidak adil, dan menerapkan pengawasan teknologi canggih terhadap etnis Uighur.</p> <p>Tiongkok telah mengubah otonomi wilayah Uighur menjadi sesuatu yang menyerupai kamp interniran besar-besaran. Pemerintah Tiongkok menolak kritik dari PBB berupa definisi luas terorisme dan referensi samar-samar keekstrimisme dan definisi separatisme yang tidak jelas dalam undang-undang Tiongkok.</p>

Sumber: Diolah dari (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998.)

Penjelasan proses sekuritisasi dimulai dari *Speech Act* hingga tahap terakhir yaitu *Effect Inter-unit by Breaking Free of Rules* telah dijelaskan melalui proses yang bertahap dan berurutan dalam bab dan Subbab yang ada dalam penelitian ini.

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui proses dan hasil sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang secara ringkas dengan tujuan untuk menyederhanakan sekuritisasi tersebut dengan sejas-jelasnya, Dengan demikian penelitian ini telah menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok melakukan sekuritisasi terhadap etnis Uighur yang dianggap sebagai ancaman dan sebagai justifikasi kepada ancaman dan sanksi dunia internasional.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Permasalahan antara pemerintah Tiongkok dan etnis Uighur masih berlanjut menuju babak baru dimana 2018-2021 adalah masa dimana pemerintah Tiongkok mulai sangat serius menangani permasalahan di Xinjiang terkait ancaman terorisme, ekstrimisme, dan separatisme, Konflik diantara kedua pihak terjadi sampai sekarang. Untuk menjaga agar wilayah Xinjiang agar tetap aman dan kondusif, pemerintah Tiongkok membentuk *Re-education Camp* yang mulai beroperasi pada tahun 2018 bertujuan untuk melawan *Three Evils* yang ada di Xinjiang.

Masalah kompleks yang terjadi di Xinjiang menuntut pemerintah Tiongkok untuk bertindak secara serius dengan metode sekuritisasi terhadap etnis Uighur dengan tujuan untuk menghapuskan ancaman yang mengancam kestabilan negara dan keutuhan regional, berkaca pada kejadian-kejadian di mana etnis Uighur menyerang Pemerintah Tiongkok dengan cara pengeboman, pembunuhan, dan penyerangan terhadap pihak dan institusi negara di provinsi Xinjiang serta usaha untuk keluar dari ancaman dan sanksi dunia internasional, penerapan sekuritisasi ini bertujuan untuk menghilangkan ancaman tersebut.

Melalui penjabaran komponen di atas implementasi sekuritisasi bisa menurunkan bahkan menghilangkan ancaman berupa aksi terorisme, ekstrimisme, dan separatisme yang telah lama mengakar di Xinjiang dan menjadi sumber ancaman bagi Pemerintah Tiongkok, dan cara ini terbilang sukses besar walaupun disisi lain kesuksesan besar pemerintah Tiongkok ini didapat dengan cara

mengesampingkan HAM yang dimiliki oleh etnis Uighur dengan menggunakan diskriminasi serta kekerasan.

Berdasarkan penjelasan peneliti dengan menggunakan konsep sekuritisasi dari Buzan dkk, meliputi tiga komponen utama yaitu *Existensial Threat*, *Emergency Action* dan *Breaking Free of Rules*. penjelasan peneliti mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaan yang ada didalam penelitian ini mengenai sekuritisasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang tahun 2018-2021 yang dijadikan sebagai langkah sekuritisasi oleh Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok telah memprioritaskan isu keamanan dalam kasus etnis Uighur di Xinjiang. Pembentukan dan penerapan Kebijakan *Sekuritisasi* justru mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga, secara langsung penerapannya mengakibatkan kekerasan. Sekuritisasi dijadikan sebagai alat untuk keamanan Tiongkok yaitu melindungi negaranya dari serangan teror orang asing. Namun, dalam upaya ini juga perlu adanya keseimbangan antara penanganan kasus etnis Uighur dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang telah ada.

4.2.REKOMENDASI

Merujuk pada kesimpulan dan analisa penelitian di atas, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang hanya berfokus pada proses langkah sekuritisasi oleh pemerintah Tiongkok melalui legitimasi penerapan sekuritisasi di tahun 2018-2021. Maka dengan demikian, penulis berharap agar penelitian selanjutnya melakukan penelitian terkait dengan kelanjutan dari langkah baru pemerintah Tiongkok yang mensekuritisasi etnis Uighur di Xinjiang pada tahun 2021 sampai seterusnya. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan penelitian tentang langkah baru dari sekuritisasi yaitu terciptanya desekuritisasi pemerintah

Tiongkok terhadap etnis Uighur di Xinjiang sebagai upaya finishing atau end game oleh pemerintah Tiongkok.



DAFTAR PUSTAKA

- CONGRESSIONAL-EXECUTIVE COMMISSION ON CHINA ANNUAL REPORT 2014.” n.d. Accessed September 27, 2021. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113hhr89906/html/CHRG-113hhr89906.htm>.
- Anthony, Mely Caballero, Ralf Emmers, and Amitav Acharya. 2006. *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*. Ashgate Publishing, Ltd.
- BBC News. 2018. “China Uighurs: Beijing Denies Detaining One Million,” August 13, 2018, sec. China. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45173573>.
- BBC Indonesia. (2019, Desember 4). *BBC Indonesia*. Retrieved Agustus 20, 2020, August 13, 2018, sec. China. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-45173573>.
- BBC News Indonesia. 2019 “Muslim Uighur dan perlakuan Cina terhadap mereka, from China dibuat murka oleh langkah AS mengesahkan RUU Uighur: "RUU langgar hukum internasional, jahat dan memfitnah. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-46601638>.
- Bhattacharji, Preeti. 2008. “Uighurs and China’s Xinjiang Region,” August 1, 2008. <http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/08/01/A R2008080100933.html>.

Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap de Wilde. 1998a. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, Colo: Lynne Rienner Pub.

Buzan, Barry, Ole Wæver and Jaap de Wilde. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder, Colo: Lynne Rienner Pub.

Buckley, C., & Ramzy, A. (2019, Desember 9). *The New York Times*. Retrieved

Agustus 20, 2020, from Facing Criticism Over Muslim Camps, China Says:

What's The Problem?:

<https://www.nytimes.com/2019/12/09/world/asia/china-camps-muslims.html>

CNN indonesia 2021 China Persilakan PBB Selidiki Pelanggaran HAM Muslim Uighur.” Accessed September 28, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210223141954-113-609831/china-persilakan-pbb-selidiki-pelanggaran-ham-muslim-ughur>.

Clarke, Michael. 2008. “China’s ‘War on Terror’ in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism.” *Terrorism and Political Violence* 20 (2): 271–301. <https://doi.org/10.1080/09546550801920865>.

Clarke. 2010. “China, Xinjiang and the Internationalisation of the Uyghur Issue.” *Global Change, Peace & Security* 22 (2): 213–29. <https://doi.org/10.1080/14781151003770846>.

PBB, 1948 "DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA ”

Fajryan Subagya, 2018" Repressive and Discriminatory Practices of the Xinjiang Provincial Government Toward Uyghur Minority", Universitas Jember.

Secretary-General of PBB, 2021 “Gender Equality Means Business, Secretary-General Tells Corporate Leaders.” 2021. UN News. March 16, 2021. <https://news.un.org/en/story/2021/03/1087452>.

- Gery Boy, Jonathan. 2014. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perlakuan Diskriminatif terhadap Etnis Minoritas (studi kasus : Etnis Muslim Uighur di China)." 2014. <https://123dok.com/document/oz1ompq9-tinjauan-hukum-internasional-perlakuan-diskriminatif-minoritas-muslim-ughur.html>.
- Hong, Ji Yeon, and Wenhui Yang. 2020. "Oilfields, Mosques and Violence: Is There a Resource Curse in Xinjiang?" *British Journal of Political Science* 50 (1): 45–78. <https://doi.org/10.1017/S0007123417000564>.
- Ryseldha .C.P, 2020, "Upaya Tiongkok dalam mempertahankan provinsi Xinjiang ditengah tekanan internasional, Universitas Dipenogoro ,<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Kaltman, Blaine. 2007. *Under the Heel of the Dragon: Islam, Racism, Crime, and the Uighur in China*. Ohio University Research in International Studies. Global and Comparative Studies Series, no. 7. Athens: Ohio University Press.
- Fransisca, M ,2019"Kebijakan Pemerintah Tiongkok Terhadap Konflik Uyghur Dan Han: Studi Kasus Konflik Xinjiang Di Tiongkok .
- Lam, Oiwen. 2017. "Tiongkoks Xinjiang Resident Are Being Forced to Install Surveillance Apps on Mobile Phones." *Global Voices*, 19 2017. <http://advox.globalvoices.org2017/07/19/Tiongkoks-xinjiang-resident-are-being-forced-to-install-surveillance-apps-on-mobile-phones>.
- Madu, Ludiro, Denada Faraswacyen L Gaol, and Tulus Yuniasih. n.d. "Jurnal Ilmu Hubungan Internasional," 96.

Zamane .id “Melihat Xinjiang, Negeri Uighur Yang Kaya Minyak Dan Luasnya Tiga Kali Sumatera.” n.d. Accessed September 28, 2021. <https://zamane.id/ragam/2505-xinjiang-negeri-uighur-yang-kaya-minyak-dan-luasnya-tiga-kali-sumatera>.

Simon-Skjodt ,2021“Uyghur_Report.To make Us Slowly Dissepear, The chinesse Governen aassault on the Uyghurs ” .United State Holocaust Memorial Museum

New York Times, 2021 “Opinion | What Really Happens in China’s ‘Re-Education’ Camps - The New York Times.” n.d. Accessed September 28, 2021. <https://www.nytimes.com/2018/05/15/opinion/china-re-education-camps.html>.

BBC News, 2021 “china diganjar sanksi oleh negara barat” n.d. Accessed September28,2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56456176>

Saragih, Muhammad Fajrin. 2015 “Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter” ,Universitas Medan.

Senduk, James. 2014. “Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 Studi Kasus Diskriminasi Terhadap Etnis Uighur Di China”, Universitas Hassanudin Makassar” .

Separatism And The War On Terror In China’s Xinjiang Uighur.” n.d. Accessed December17,2021.<https://www.peaceopstraining.org/cotipso/theses/separatism-and-the-war-on-terror-in-chinas-xinjiang-uighur-auto/>.

WUC Report ,“STRATEGI WUC DALAM MENYUARAKAN KASUS ETNIS
UIGHUR Tahun 2014-2019.”

Due Wei Zeng & Ju, 2019“The Energy Industry in Xinjiang, China: Potential,
Problems, and Solutions.”.Accessed September 27, 2021.
[https://www.powermag.com/energy-industry-xinjiang-china-potential-
problems-solutions-web/](https://www.powermag.com/energy-industry-xinjiang-china-potential-problems-solutions-web/).

Trihartono, Agus, and Chairun Nisya, 2019 “Keamanan Dan Sekuritisasi Dalam
Hubungan Internasional” Melvana, Depok .

Karisma ,G, 2018 "Konflik Etnis di Xinjiang : Kebijakan Monokultural dan
Kepentingan Negara China terhadap keutuhan Wilayah",Jurnal Universitas
Lampung.

Walt, Stephen M. 1991. “The Renaissance of Security Studies.” *International
Studies Quarterly* 35 (2): 211. <https://doi.org/10.2307/2600471>.

VOA,2022 "Kepala HAM PBB akan kunjungi Xinjiang"
[https://www.voaindonesia.com/a/kepala-ham-pbb-akan-kunjungi-
xinjiang-china-mei-2022/6475574.html](https://www.voaindonesia.com/a/kepala-ham-pbb-akan-kunjungi-xinjiang-china-mei-2022/6475574.html)

Aris, Stephen. 2013. Shanghai Cooperation Organization, Mapping
Multilateralism in Transition. New York, International Peace Institute .

Xiaodong, Zhao. 2012. The Shanghai Cooperation Organization and Counter
terrorism Cooperation.Stockhom